

PENGARUH BELANJA MODAL, BELANJA BARANG DAN JASA TERHADAP SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) KABUPATEN/KOTA di SULAWESI TENGAH

Iswahyudin

Yudi_Arsitek@Yahoo.Co.id

Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

The objectives of this study are :1) to find out the development of capital expenditure, good and service expenditure on budget surplus in districts/cities in Central Sulawesi; 2) to find out and analize simultaneous influence of capital expenditure, good and service expenditures on budget surplus in districts/cities in Central Sulawesi; 3) to find out and analyze partial influence of capital expenditure on budget surplus in districts /cities in Central Sulawesi ; 4) to find out and analyze partial influence of good and service expenditures on budget surplus in districts/cities in Central Sulawesi. Population of this study consists of 13 districts/cities in Central Sulawesi and 11 districts/cities are selected as sample based on purposive sampling method. The research method used is verification by means of multiple linear regressions analysis. The results of the test show that 50,40% of budget surplus is influenced by capital expenditure and good and service expenditure : while 49,6% is influenced by other factors, Multiple linear regression tests indicate that capital expenditure, good and service expenditures simultaneously and partially have significant influence on budget surplus in districts/cities in Central Sulawesi.

Keywords: capital expenditure, good and service expenditure, budget surplus

Dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 22 ayat menyebutkan bahwa Struktur APBD terdiri dari; pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Selanjutnya dalam pasal 23 dijelaskan bahwa : Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah; sedangkan yang dimaksud Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah; dan Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.'

Dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, idealnya pelaksanaan belanja daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada prestasi kerja, dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan outcome yang diharapkan dari kegiatan dan program, sehingga pendekatan kinerja mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik. Anggaran belanja daerah akan mempunyai peran rill dalam peningkatan kualitas layanan publik sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila dapat terealisasi dengan baik. Untuk itu, pemerintah harus terus mendorong agar proses penetapan Peraturan Daerah (Perda) APBD dapat dilakukan tepat waktu guna mempercepat realisasi belanja daerah karena keterlambatan realisasi belanja daerah dapat berdampak pada

penumpukan dana daerah yang belum terpakai serta kecendrungan daerah untuk melakukan perubahan APBD pada saat menjelang akhir tahun anggaran berjalan (diatas bulan september) bisa diantisipasi, sehingga tidak mengurangi kemampuan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), untuk menyesuaikan belanja yang diakibatkan sempitnya waktu yang tersisa untuk melaksanakan kegiatan, karena kecendrungan daerah melakukan perubahan APBD setelah diketahuinya hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun sebelumnya. Jadi pemerintah daerah harus menciptakan belanja daerah yang berkualitas dengan berupaya secara konsisten mengarahkan sumber daya yang terbatas agar dapat digunakan secara terukur, efektif, efesien, untuk mencapai target yang ditetapkan karena jika anggaran tidak terserap sepenuhnya saat tahun anggaran berakhir maka akan menjadi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). Menurut pengamat ekonomi Longaday (2007) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dapat disumbangkan dari pelampaian target pendapatan, SILPA dapat terjadi karena kelebihan perhitungan dana (over estimate) pada belanja dan SILPA yang bersumber dari anggaran beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan, sisa dana tender proyek karena adanya penawaran yang lebih rendah dari pagu anggaran yang disediakan proyek tersebut dalam upaya penghematan. (Dian Andalia, dkk.2012. Pengaruh Varian Pendapatan Dan Varian Belanja Terhadap Pemerintah Di Kabupaten/Kota Se Aceh. *Jurnal Akuntansi*. 1-2). Jika melihat struktur APBD berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005, pada saat penyusunan APBD, pemerintah daerah tidak akan menganggarkan SILPA yang akan diperoleh pada akhir tahun anggaran bersangkutan sebab pada saat penyusunan APBD SILPA akhir tahun ini

masih belum pasti, baru merupakan estimasi yang belum terealisasi. SILPA akhir tahun anggaran hanya dapat diketahui jumlahnya setelah berakhir periode anggaran tersebut, yaitu tanggal 31 Desember. Namun untuk SILPA tahun anggaran sebelumnya akan muncul dalam APBD tahun berkenaan sebagai pos penerimaan pembiayaan. Tentunya Anggaran SILPA tahun lalu harus sama dengan realisasinya, artinya seluruh saldo SILPA tahun lalu telah dialokasikan pada anggaran tahun sekarang. SILPA tersebut bersifat carry-over fund yang akan berpengaruh pada neraca yaitu menambah akun ekuitas dana khususnya ekuitas dana lancar. Saldo SILPA akhir periode anggaran akan muncul dalam neraca akhir periode untuk tahun berkenaan. Perlu juga dipahami bahwa SILPA akhir tahun anggaran tidak sama dengan saldo akhir kas yang terdapat dineraca akhir, sebab SILPA merupakan kas tunai sebagai sisa anggaran, sedangkan kas dalam neraca akhir adalah kas dan setara kas yang dimiliki pemerintah daerah yang timbul dari aktivitas anggaran maupun non anggaran. Pertumbuhan SILPA dapat digunakan untuk menilai kinerja anggaran. SILPA yang bersaldo positif memberikan indikasi kesehatan fiskal dan kesinambungan fiskal daerah yang baik, sebaiknya jika terjadi SIKPA (Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran) hal ini mengindikasikan adanya masalah dalam manajemen keuangan daerah dan mengganggu kesinambungan fiskal daerah. (Mahmudi 2010 ; 177).

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, (2013)bahwa besaran SILPA yang masih tinggi membawa dampak positif dan negatif bagi daerah, dampak positif adanya SILPA adalah adanya imbal balik yang diterima pemda dari SILPA yang disimpan di perbankan. Imbal balik dapat berupa jasa giro atau pendapatan

bunga yang masuk dalam akun lain-lain PAD yang sah. Sedangkan dampak negatifnya adalah adanya belanja yang tertunda.

Struktur APBD yang baru yang berbasis kinerja memungkinkan terdapatnya SILPA pada akhir tahun anggaran, dan dana sisa anggaran tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk sumber pembiayaan dan penerimaan untuk tahun berikutnya. SILPA mempresentasikan sisa kas yang timbul karena realisasi pendapatan daerah yang melebihi realisasi belanja daerah. Ada tidaknya SILPA dan besar kecilnya sangat bergantung pada tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah. Jika pada tahun anggaran tertentu tingkat belanja daerah relatif rendah atau terjadi efisiensi anggaran, maka dimungkinkan akan diperoleh SILPA yang lebih tinggi. Tetapi sebaliknya jika belanja daerah tinggi, maka SILPA yang diperoleh akan semakin kecil, bahkan jika belanja daerah lebih besar dari pada pendapatan daerah akan menyebabkan terjadinya defisit anggaran.(Mahmudi 2010 ; 173).

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam Laporan Evaluasi Belanja Modal Tahun 2013 bahwa Belanja pegawai yang masuk dalam golongan belanja langsung, bersifat kompensasi baik itu dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan. Dimana maksud dari kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima dapat berupa fisik maupun non fisik dan harus dihitung dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena belanja pegawai dari golongan belanja langsung ini bersifat kompensasi dan konsumtif (kebocoran) maka dalam menganggarkan belanja pegawai berdasarkan permendagri No. 25 tahun 2009 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2010 : “Penganggaran honorarium bagi PNSD supaya dibatasi sesuai dengan tingkat kewajaran dan beban tugas. Dasar perhitungan besaran honorarium disesuaikan dengan standar yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Perkembangan realisasi penyerapan belanja daerah dipengaruhi oleh bagaimana pola perencanaan dan penganggaran di daerah, mekanisme transfer, dan pelaksanaan program kegiatan di daerah, sehingga dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki, salah satunya adalah memberikan proporsi pada belanja yang bersifat investasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang yaitu belanja modal, belanja barang dan jasa pada sektor-sektor produktif di daerah.

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Berbeda dengan belanja operasi yang bersifat jangka pendek dan rutin, pengeluaran belanja modal tidak bersifat rutin. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan daerah rendah pada umumnya justru memiliki proporsi tingkat belanja modal yang lebih tinggi disebabkan pemerintah daerah dengan pendapatan rendah berorientasi untuk giat

melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang, sedangkan pemerintah daerah yang pendapatanya tinggi biasanya telah memiliki aset modal yang mencukupi. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah 5 – 20 persen.(Mahmudi 2010;164-165)

Realisasi Belanja modal pada APBD diakhir tahun sering kali pelaksanaanya dibawah target atau lebih rendah dibandingkan dengan anggaranya. Hal ini ditenggarai karena daerah tidak cukup mampu mengejar peningkatan belanja atau belum cukup mampu melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meyerap pelampauan pendapatan tersebut saat terjadi tambahan pendapatan yang cukup signifikan dari transfer Pusat ataupun peningkatan yang lainya.

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksud untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.Pembelian/Pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa tersebut mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, kendaraan bermotor cetak/penggandaan,sewa

rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti mencoba melihat sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh pengaruh belanja investasi yaitu belanja modal, belanja barang dan jasa terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan dengan melakukan penelitian tentang “Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten/Kota di-Sulawesi Tengah”

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana perkembangan Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah ?, 2) Apakah Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, (SILPA) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah 3) Apakah Belanja Modal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah ?, 4) Apakah Belanja Barang dan Jasa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah?

METODE

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial dengan memusatkan pada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan pengaruh antara berbagai variabel (Nasution, 1982:41 dalam Riduwan, 2012:65). Sedangkan menurut Sugiyono (2007) metode kuantitatif adalah metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkret/empiris, obyektif, terukur, rasional,

dan sistematis. Metode ini juga disebut metode *discovery* karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan iptek baru. Metode ini disebut juga metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah yaitu 10 Kabupaten 1 Kota sehingga berjumlah 11 Kabupaten/Kota. Berikut daftar nama Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah yang menjadi populasi dalam penelitian ini.

Tabel 1. Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Sebagai Populasi

	Nama Daerah
1.	Kota Palu
2.	Kabupaten Banggai
3.	Kabupaten Banggai Kepulauan
4.	Kabupaten Buol
5.	Kabupaten Toli-toli
6.	Kabupaten Donggala
7.	Kabupaten Morowali
8.	Kabupaten Poso
9.	Kabupaten Parigi Moutong
10.	Kabupaten Tojo Una una
11.	Kabupaten Sigi
12.	Kabupaten Morowali Utara
13.	Kabupaten Banggai Laut

Sumber: Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, 2015

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di-Sulawesi Tengah

Perkembangan Alokasi Belanja Langsung Kabupaten/Kota di Sulawesi

Tengah selama 3 (tiga) tahun terakhir seperti yang terdapat dalam tabel 2

Tabel 2. Perkembangan Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di-Sulawesi Tengah Tahun 2012 – 2014

No	Kab/Kota	Belanja Modal			Rata-rata Perkembangan
		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	
a	b	c	d	e	f
1	Palu	121.775,3 34.474,00	249.221,0 79.506,00	268.659,5 99.776,00	37,485
2	Donggala	152.180,9 66.870,00	204.225,7 53.225,00	183.888,9 22.003,00	8,08
3	Parimo	158.396,3 33.403,73	177.573,4 01.553,50	206.938,9 79.635,00	9,548
4	Poso	145.920,2 22.002,00	134.871,7 14.584,47	185.880,4 76.707,00	10,08
5	Morowali	173.763,2 63.121,00	199.252,2 51.912,00	111.639,8 22.666,00	-9,767
6	Tojo Una	179.520,8 30.283,00	147.978,0 07.923,00	205.097,6 74.774,00	7,01
7	Banggai	164.321,2 66.073,00	211.972,8 00.500,01	259.628,4 76.344,02	17,16
8	Bangkep	167.109,6 71.983,00	190.362,7 98.083,00	119.587,6 06.139,00	-7,755
9	Toli-Toli	100.169,4 68.018,00	161.011,0 24.649,09	164.174,5 79.164,00	20,901
10	Buol	96.149,76 1.372,31	125.850,0 89.460,69	139.252,1 63.652,03	13,846
11	Sigi	127.794,3 80.043,53	137.095,2 35.311,00	158.151,5 64.126,00	7,546

2. Perkembangan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten/kota di-Sulawesi Tengah

Perkembangan Alokasi Belanja Langsung Kabupaten/Kota di Sulawesi

Tengah selama 3 (tiga) tahun terakhir seperti dalam tabel 3:

Tabel 3. Perkembangan Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di-Sulawesi Tengah Tahun 2012 – 2014

No	kab/kota	Belanja Modal			Rata-rata Perkembangan
		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	
a	b	c	d	e	f
1	Palu	121.775.334.474, 00	249.221.079.5 06,00	268.659.599. 776,00	37.485
2	Donggala	152.180.966.870, 00	204.225.753.2 25,00	183.888.922. 003,00	8.08
3	Parimo	158.396.333.403, 73	177.573.401.5 53,50	206.938.979. 635,00	9.548
4	Poso	145.920.222.002, 00	134.871.714.5 84,47	185.880.476. 707,00	10,08
5	Morowali	173.763.263.121, 00	199.252.251.9 12,00	111.639.822. 666,00	-9.767
6	Tojo Una	179.520.830.283, 00	147.978.007.9 23,00	205.097.674. 774,00	7.01
7	Banggai	164.321.266.073, 00	211.972.800.5 00,01	259.628.476. 344,02	17.16
8	Bangkep	167.109.671.983, 00	190.362.798.0 83,00	119.587.606. 139,00	-7.755
9	Toli-Toli	100.169.468.018, 00	161.011.024.6 49,09	164.174.579. 164,00	20.901
10	Buol	96.149.761.372,3 1	125.850.089.4 60,69	139.252.163. 652,03	13.846
11	Sigi	127.794.380.043, 53	137.095.235.3 11,00	158.151.564. 126,00	7.546

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah, 2012-2014 (data diolah)

3. Perkembangan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten/ Kota Se-Sulawesi Tengah

Perkembangan Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran (SILPA)

menunjukkan berfluktuasi selama 3 (tiga) tahun terakhir pada Kabupaten/Kota di-Sulawesi Tengah. Berikut perkembangan SILPA selama 3 (tiga)tahun terakhir seperti pada tabel 4:

**Tabel 4. Perkembangan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun 2012 – 2014**

No	Kabupaten/Kota	SILPA (Rp)			Rata-Rata Perkembangan
		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	
a	b	c	d	e	f
1	Palu	62,933,767,748. 16	80,630,538,326. 86	69,297,285,9 94.37	4,69
2	Donggala	52,287,956,425. 65	48,271,870,250. 51	61,360,934,0 39.72	6.48
3	Parimo	67,090,536,748. 50	51,422,189,378. 08	78,905,368,7 52.07	10.03
4	Poso	20,373,698,673. 36	36,509,531,634. 71	46,945,242,1 36.86	35.93
5	Morowali	9,730,447,840.6 9	24,297,393,295. 01	16,486,284,4 23.65	39.19
6	Tojo	35,675,295,727. 56	47,540,235,317. 73	64,069,707,5 41.19	22.68
7	Banggai	93,643,488,360. 26	81,346,515,708. 17	101,796,246, 150.84	4.00
8	Bangkep	51,418,889,136. 18	74,338,907,251. 36	109,116,086, 807.10	30.45
9	Toli-Toli	37,567,648,489. 80	45,841,238,661. 21	55,974,395,8 16.34	14.71
10	Buol	7,893,556,911.0 2	37,336,586,476. 19	52,134,317,6 89.87	137.54
11	Sigi	32,099,808,075. 72	36,064,245,100. 64	43,681,793,4 26.38	11.16

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah, 2012-2014 (data diolah)

Deskriktif Statistik

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa , Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) masing-masing sebanyak 3 periode berjalan yaitu tahun 2012 sampai dengan 2014, seluruh data yang diperoleh berisi data Laporan Realisasi Anggaran tahunan setiap kabupaten/kota di Sulawesi Tengah yang bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

(LHP-BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Seluruh data tersebut dikumpulkan dengan metode observasi non perilaku yaitu dilakukan dengan mengamati secara langsung dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah..

1) Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk mengetahui apakah model linear berganda yang digunakan pada penelitian ini memenuhi persyaratan seperti: Uji

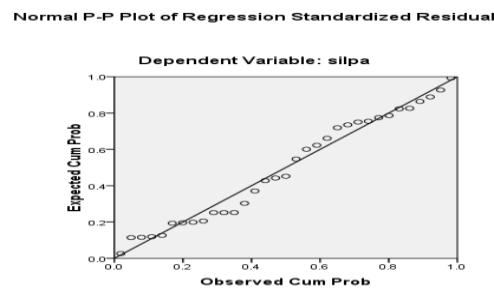
Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi dan Uji Heterokedastisitas. Adapun uji asumsi klasik adalah sebagai berikut

a. Uji Normalitas

Normalitas bertujuan mengkaji apakah dalam sebuah model regresi variable dependen (terikat), variable independen (bebas) atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Deteksi normalitas dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan adalah:

1. Jika data tersebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika menyebar jauh dari diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dengan bantuan program statistik SPSS 16 hasil Uji Normalitas data dapat dilihat pada titik sebaran data yang dihasilkan dalam penelitian ini sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam



b. Uji Multikolinearitas

Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah diantara variable bebas (indeviduen) tidak saling berkorelasi atau tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variable. Menurut Gunawan (2001 : 235) untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari besaran VIF (Variance Inflation Factor) kurang dari 10 dan Tolerance lebih besar dari angka 0,10 serta koefisien antara variable independen di bawah 0,5 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

Hasil Uji multikolinearitas dengan menggunakan variance Inflation Factor (VIF) seperti pada table 5

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

No	Varibel Independen	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	BELANJA MODAL (X_1)	0,718	1,324
2	BELANJA BARANG DAN JASA (X_2)	0,718	1,324

Sumber : Lampiran Hasil Regresi

Dari tabel diatas bahwa nilai VIF dari variabel-variabel independen dalam model regresi yang digunakan kurang dari

angka 10 sedangkan nilai Tolerance lebih besar dari 0,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-varaibel

tersebut tidak terdapat gejala multikolinearitas

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan-kesalahan pada data runtut waktu (time series). Model regresi yang

baik adalah yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2005).

Uji autokorelasi dilakukan dengan cara melihat nilai statistik Durbin-Watson. Hasil uji Durbin-Watson ditunjukkan dengan tabel 6 (Tabel hasil uji autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.710 ^a	.504	.471	1.63327E10	1.635

a. Predictors: (Constant), belanja brg & jasa, belanja modal

b. Dependent Variable: silpa

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson adalah 1,635. Berdasarkan tabel Durbin Watson, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi.

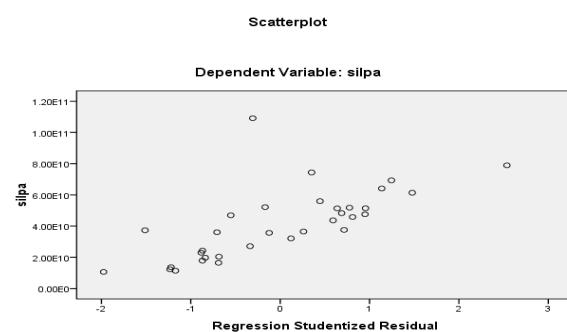
d. Uji Heterokedastisitas

Suatu model regresi dikatakan baik adalah yang homoskedastis atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas.

Uji dilakukan dengan menggunakan grafik scatterplot, dimana titik-titik yang terbentuk harus menyebar secara acak, tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, jika hal ini terpenuhi maka tidak terdapat

heteroskedastisitas dan model regresi dapat digunakan. Hasil uji heteroskedastisitas melalui grafik scatterplot pada gambar 2



Dari scatter plot pada gambar 2 di atas menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar secara acak diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat berarti tidak terjadi heterokodastisitas pada model regresi.

2) Hasil Regresi

Regresi Linear Berganda merupakan salah satu alat statistik Parametrik dengan fungsi menganalisis dan menerangkan keterkaitan antara dua atau lebih faktor penelitian yang berbeda nama, melalui pengamatan pada beberapa hasil observasi (pengamatan) di berbagai bidang kegiatan. Berkaitan dengan penelitian ini alat analisis Statistik Parametrik Regresi Linear Berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variable indepeneden (X₁, , dan X₂) terhadap variable dependen (Y). Dalam konteks penelitian ini Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengukur

pengaruh belanja modal (X₁), dan belanja barang dan jasa (X₂), terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) pada kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.

Sesuai hasil analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan bantuan komputer SPSS For Wind Release 16,0 diperoleh hasil-hasil penelitian dari 33 responden dengan dugaan pengaruh kedua variabel independen (belanja modal dan belanja barang dan jasa) terhadap terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) pada kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, dapat diketahui hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Perhitungan Regresi Berganda

Dependen Variabel Y = SILPA				
Variabel	Koefisien Regresi	Standar Error	t	Sig
C= Constanta	12714935106,803	6474745475,534	1,964	0,059
X ₁ = BM	0,078	0,031	2,504	0,018
X ₂ = BB&J	0,057	0,020	2,837	0,008
R-	= 0,710			
R-Square	= 0,504	F-Statistik	= 15,239	Adjusted R-Square =
0,471	Sig. F	= 0,000		

Sumber: Hasil Regresi

Model regresi yang diperoleh dari tabel diatas adalah:

$$Y = 12714935106,803 + 0,078X_1 + 0,057X_2$$

Persamaan diatas menunjukkan, variabel independen yang dianalisis berupa variabel (X₁, dan X₂,) memberi pengaruh terhadap variable independen (Y) model analisis regresi sisa lebih pembiayaan anggaran

(SILPA) pada kabupaten/kota di Sulawesi Tengah dapat dilihat sebagai berikut:

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan:

- Untuk nilai constanta sebesar 12714935106,803 berarti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada kabupaten/kota di Sulawesi Tengah

sebelum adanya variabel independen adalah sebesar 12714935106,803.

2. Belanja Modal (X_1) dengan koefisien regresi 0,078 ini berarti terjadi pengaruh yang positif antara Belanja Modal dan (SILPA). Artinya bahwa setiap penambahan Belanja Modal 1 satuan akan meningkatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar 0,078 satuan pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

3. Belanja barang dan jasa (X_3) dengan koefisien regresi 0,057 ini berarti terjadi pengaruh yang positif antara Belanja Barang dan Jasa dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Arinya bahwa setiap terjadi penambahan Belanja Barang dan Jasa 1 satuan akan mengakibatkan terjadi penambahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar 0,057 satuan pada kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.

3) Hasil Uji Hipotesis Penelitian

a. Pengujian Hipotesis Pertama

Uji simultan adalah sebuah pengujian untuk mengetahui apakah variabel independen (X) yang diteliti memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y) berarti semua variabel bebasnya, yakni Belanja Modal (X_1), dan Belanja Barang dan Jasa (X_2), dengan variabel tidak bebasnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah yakni:

Dari Tabel 4.6 terlihat hasil uji determinasi (kehandalan model) memperlihatkan nilai R-Square = 0,504 atau = 50,40%. Hal ini berarti sebesar 50,40% variabel tidak bebas dipengaruhi oleh kedua variabel bebas, selebihnya variabel tidak bebas

dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.

Selanjutnya berdasarkan tabel 4.3 dari hasil perhitungan diperoleh $F_{hitung} = 15,239$ pada taraf nyata $\alpha = 0,05$ atau $\alpha < 0,05$. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi $F = 0,000$. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tidak bebasnya.

Dengan demikian maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa: Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah berdasarkan hasil Uji-F ternyata terbukti.

b. Pengujian Hipotesis Kedua dan Ketiga

Pengujian secara parsial dimaksudkan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebasnya, sebagai berikut:

1. Belanja Modal (X_1)

Untuk variabel Belanja Modal, hasil perhitungannya menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,078, sementara tingkat signifikansi t sebesar 0,018. Dengan demikian nilai sig t < 0,05 pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa varibel Belanja Modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Dengan demikian maka Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa: Belanja modal berpengaruh dan signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) pada kabupaten/kota di Sulawesi

Tengah, berdasarkan hasil uji-t ternyata terbukti

2. Belanja Barang dan Jasa (X2)

Untuk variabel belanja Barang dan Jasa, hasil perhitungannya menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,057, sementara tingkat signifikansi t sebesar 0,008. Dengan demikian nilai sig t < 0,05 pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel belanja barang dan jasa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Dengan demikian maka Hipotesis Ketiga yang menyatakan bahwa: Belanja Barang dan Jasa Berpengaruh dan Signifikan terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, berdasarkan hasil uji-t ternyata terbukti.

4) Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Berdasarkan hasil regresi (multiple regression) menunjukkan bahwa variabel bebas mempunyai hubungan pada variabel terikat. Menurut Riwu Kaho (2001;61) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Otonomi Daerah adalah keuangan yang baik. Istilah keuangan disini mengandung arti bahwa setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang yang cukup dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Makin besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan, demikian juga semakin banyak pengelolaannya semakin berdaya guna

pemakaian uang tersebut, sehingga jika kegiatan di suatu daerah terjadi kekurangan kegiatan maka dapat menimbulkan sisa lebih anggaran, sehingga sisa lebih anggaran yang terjadi dapat digunakan untuk periode berikutnya. Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa berpengaruh terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Hal ini ditunjukkan dari uraian perkembangan Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa yang terjadi pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Bahwa pada dasarnya SILPA dapat disumbangkan dari pelampauan target pendapatan, kelebihan perhitungan dana (over estimate) pada belanja, anggaran beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan, sisa dana tender proyek karena adanya penawaran yang lebih rendah dari pagu anggaran yang disediakan proyek tersebut dalam upaya penghematan. (Dian Andalia, dkk.2012). Dengan kata lain besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tersebut dipengaruhi oleh belanja yang terealisasi dan faktor Pembiayaan Netto.

5) Pengaruh Belanja Modal terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Dari hasil penelitian yang dilakukan dalam hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa uji t pada variabel Alokasi Belanja modal mempunyai pengaruh signifikan terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode

akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset, yang terdiri dari (i) Belanja Tanah, (ii) Belanja Peralatan dan Mesin, (iii) Belanja Bangunan dan Gedung, (iv) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan (v) Belanja Aset Tetap Lainnya. Dimana semakin besar Belanja modal terealisasi dari yang dianggarkan maka akan semakin kecil Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada akhir tahun begitu juga sebaliknya semakin kecil Belanja Modal yang terealisasi maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada akhir tahun akan besar walaupun Pembiayaan netto juga mempengaruhi nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran .

6) Pengaruh Belanja Barang dan Jasa Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

Dari hasil penelitian yang dilakukan dalam hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa uji t pada variabel Alokasi Belanja Barang dan Jasa mempunyai pengaruh signifikan terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Belanja Barang dan Jasa dipergunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembelian/ pengadaan barang dan jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor,

premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak penggandaan, sewa rumah/gedung/parkir, makanan dan minuman, perjalanan dinas, dan lain-lain.

Semakin besar belanja barang dan jasa terealisasi dari yang dianggarkan maka akan semakin kecil Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada akhir tahun begitu juga sebaliknya semakin kecil belanja barang dan jasa yang terealisasi maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada akhir tahun akan besar walaupun pembiayaan netto juga mempengaruhi nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran .

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) akhir tahun anggaran Kabupaten Kota di Sulawesi Tengah tidak sama dengan saldo akhir kas yang terdapat dineraca akhir, sebab SILPA merupakan kas tunai sebagai sisa anggaran, sedangkan kas dalam neraca akhir adalah kas dan setara kas yang dimiliki pemerintah daerah yang timbul dari aktivitas anggaran maupun non anggaran Dimana perkembangan realisasi penyerapan belanja daerah termasuk Belanja Modal dipengaruhi oleh bagaimana pola perencanaan dan penganggaran di daerah, mekanisme transfer, dan pelaksanaan program kegiatan di daerah.
2. Realisasi Belanja Modal, Barang dan Jasa secara simultan berpengaruh terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten/ Kota Di-Sulawesi Tengah.
3. Realisasi Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Sisa Lebih

- Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten/Kota Di-Sulawesi Tengah.
4. Realisasi Belanja Barang dan Jasa berpengaruh signifikan terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten/Kota Di-Sulawesi Tengah.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, Hal-hal yang perlu direkomendasikan untuk memperbaiki dan meningkatkan realisasi Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah pusat perlu melanjutkan kebijakan pengenaan sanksi kepada pemda yang terlambat menetapkan dan menyampaikan perda APBD, dan memberikan reward kepada pemda yang tepat waktu dalam menetapkan dan menyampaikan perda APBD.
2. Perlu mengusulkan secara resmi kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun ketentuan (Permendagri) yang mengatur bahwa perubahan APBD dapat dilakukan lebih awal tanpa harus menunggu hasil audit realisasi APBD tahun sebelumnya sehingga APBD perubahan setiap tahunya dapat dilakukan sebelum bulan mei. Hal ini merujuk pada UU No 17 Nomor 2003 pasal 28 yang menyebutkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan kebijakan umum APBD
3. Pemerintah pusat perlu melakukan upaya percepatan informasi transfer kepada daerah pada bulan November sebelum tahun anggaran dimulai sehingga daerah dapat mencantumkan angka yang relatif optimis dalam perencanaan APBD.
4. Adapun hal-hal yang perlu dikordinasikan di level pemerintah pusat, yaitu :
 - a. Kementerian Teknis di haruskan menetapkan petunjuk teknis untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, atau kementerian teknis tidak lagi menerbitkan petunjuk teknis, tetapi cukup menetapkan pedoman umum penggunaan DAK untuk pencapaian standart pelayanan minimum dan prioritas nasional sebagai dasar pelaksanaan di daerah yang dapat direvisi 2 (dua) tahun sekali. Hal ini sesuai dengan draft revisi UU Nomor 33 Tahun 2004.
 - b. Petunjuk Teknis tidak dibuat terlalu rigid, tetapi dibuat lebih umum dan lebih fleksibel serta peruntukanya untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sehingga daerah lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan DAK dan adanya kepastian kegiatan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis DAK. Hal tersebut sesuai dengan draft usulan revisi UU nomor 33 tahun 2004, dimana kementerian teknis menerbitkan pedoman umum penggunaan DAK untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan prioritas nasional.
5. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil studi banding

dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus perjalanan dinas keluar negeri berpedoman pada instruksi Presiden Nomor 11 tahun 2005 dan peraturan menteri dalam negeri nomor 11 tahun 2011.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis akui bahwa dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis telah banyak mendapat bantuan petunjuk dan arahan yang konstruktif dari berbagai pihak terutama kepada ketua Tim Pembimbing Prof. DR. Anhulaila M. Palampanga, M.S, dan Anggota Tim Pembimbing Prof. Dr. H. Ridwan, S.E., M.Si., AK., AC, semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat dan mendorong lahirnya karya ilmiah yang lebih baik dikemudian hari.

DAFTAR RUJUKAN

- Andisita, 2013, Pengaruh Alokasi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah, *Tesis* tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana Universitas Tadulako, Palu
- Andalia, Dian 2012. Pengaruh Varian Pendapatan Dan Varian Belanja Terhadap Pemerintah Di Kabupaten/Kota Se Aceh. 1-2).
- Dirjen Perimbangan Keuangan, 2013, Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Daerah Yang Berasal Dari Penerimaan Silpa, Kemenkeu RI 2013
- Dirjen Perimbangan Keuangan, 2013, Laporan Evaluasi Belanja Modal Daerah , Kemenkeu RI 2013
- Ghozali, Imam. 2005. *Applikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Penerbit UNDIP. Semarang
- Kaho, Josef Riwo, 1991, *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta.
- Mahmudi,2010, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta
- Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 *tentang* Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 *tentang* Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *tentang* Keuangan Negara
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang* Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 *tentang* Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 *tentang* Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 *tentang* Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Riduwan, 2012, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Penerbit Alfabeta Bandung.

Sugiyono, 2007. Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Kesepuluh, CV Alfabeta, Bandung.

Widiarso Wahyu (<http://wahyuwidiarso.blogspot.com/2011>), tentang Adjusted R Square pada SPSS.